

ABSTRAK

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA *ROAD BARRIER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh:
Silvia Kirani**

Kemacetan di Kota Bandar Lampung menjadikan adanya keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) atau Pak Ogah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa keberadaan Supeltas sangat membantu kelancaran lalu lintas apabila tidak adanya polisi lalu lintas, sebagian pula ada yang berpendapat bahwa keberadaan Supeltas justru menimbulkan keresahan, kemacetan lalu lintas, dan pungutan liar. Apalagi dengan aksinya yakni membuka paksa pembatas jalan atau *road barrier* diluar jadwal yang telah ditentukan dan tanpa seizin dari polisi lalu lintas. Hal ini telah melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) ditinjau dari Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, (2) Apakah kebijakan dari kepolisian bagian satuan lalu lintas (Polantas) sudah benar terhadap keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam studi lapangan, peneliti mengambil empat narasumber diantaranya yakni Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas, Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat diketahui bahwa tindakan membuka pembatas jalan tanpa izin dari pihak berwenang oleh Supeltas merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik dari segi keselamatan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Fungsionalisasi hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan

keamanan lalu lintas, di mana penegakan hukum yang tegas dan regulasi yang jelas sangat diperlukan. Penegak hukum seperti kepolisian belum memiliki kebijakan yang spesifik dalam mengatur peran supeltas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek hukum dan penegakan aturan. Di satu sisi, Supeltas dianggap membantu pengguna jalan, namun di sisi lain, tindakan mereka dapat bertentangan dengan prinsip ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diperlukan bimbingan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi bagian satuan lalu lintas terhadap masyarakat yang menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan pengaturan jalan, dan menerapkan sanksi pidana kepada Supeltas yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Supeltas, *Road Barrier*, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRACT

THE FUNCTIONALIZATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS VOLUNTEER TRAFFIC CONTROLLERS WHO FORCIBLY OPEN ROAD BARRIERS IN THE PERSPECTIVE OF THE ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION LAW (Case Study at the Bandar Lampung City Police Department)

**By:
Silvia Kirani**

Traffic congestion in Bandar Lampung City has led to the emergence of volunteer traffic controllers or Pak Ogah. Some members of the public believe that volunteer traffic controllers are very helpful in regulating traffic flow in the absence of traffic police, while others argue that their presence causes unrest, traffic congestion, and illegal levies. This becomes more problematic when they forcibly open road barriers outside of the designated schedule and without permission from traffic police officers. Such actions violate the provisions of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.

The issues discussed in this thesis are: (1) How is the functionalization of criminal law applied to volunteer traffic controllers who forcibly open road barriers, from the perspective of the Road Traffic and Transportation Law and (2) Whether the policy of the traffic unit police regarding the presence of volunteer traffic controllers in Bandar Lampung City has been appropriate.

This research uses normative juridical and empirical juridical methods, with primary and secondary data sources. Data were collected through literature review and field studies. In the field study, the researcher interviewed four sources: a volunteer traffic controller, the Head of the Traffic Unit of the Bandar Lampung City Police Department, and a lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the research and discussion, it can be concluded that the act of forcibly opening road barriers without authorization by volunteer traffic controllers constitutes a legal violation that may result in serious consequences, both in terms of safety and law enforcement. Therefore, the functionalization of criminal law plays an important role in maintaining traffic order and safety, where firm law enforcement and clear regulations are highly necessary. Law enforcement authorities such as the police have not yet formulated specific policies to regulate

Silvia Kirani

the role of Supeltas, leading to legal ambiguity and challenges in enforcement. On one hand, volunteer traffic controllers are perceived as assisting road users, but on the other hand, their actions may conflict with the principles of traffic order and safety.

This study suggests that guidance should be provided by law enforcement authorities, particularly the traffic unit police, to community members who act as volunteer traffic controllers. Additionally, criminal sanctions should be imposed on volunteer traffic controllers who commit violations in accordance with the provisions set forth in the Road Traffic and Transportation Law.

Keywords: Supeltas, Road Barrier, Road Traffic and Transportation